

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca-Pilkada Syarif Hidayat	169–180
Perilaku dan Sikap Sosial-Politik Mahasiswa dalam Pilpres 2009 Ari Pradhanawati	181–186
Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan <i>E-Government</i> Achmad Habibullah	187–195
Strategi Peningkatan Akses Pasar dan Peluang Inovasi Usaha Kecil Nelayan Pasuruan Edy Wahyudi	196–205
Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah dalam Pengelolaan Pesisir secara Terpadu di Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara R. Hamdani Harahap	206–212
Management of Local Forestry Resources in Overcoming Poverty and Environmental Issues Slamet Rosyadi	213–220
Respon Komunitas Waria Surabaya terhadap Konstruksi Subjek Transgender di Media Indonesia Rachmah Ida	221–228
Pasang sebagai Modal Sosial Pengelolaan Hutan pada Masyarakat Adat Ammatowa Sarkawi B. Husain dan Sri Endah Kinasih	229–235
Wacana Dominan dalam Teks <i>Awig-awig</i> I.B. Putera Manuaba	236–243
Pengaruh Kausalitas Tingkat Fertilitas Total (TFR) Penduduk terhadap Tingkat Demokrasi Fendy E. Wahyudi	244–255

Wacana Dominan dalam Teks *Awig-awig*¹

I.B. Putera Manuaba²

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

Awig-awig text was the social order in the Balinese society. The attitude and social behavior of the Balinese society was based on Awig-awig. The aim of this research was to explain the dominant discourse in the awig-awig text. This research use of approach qualitative-textual, and used the data of awig-awig text from Bali. The text was analysed from the perspective of Foucault discourse. The results of this research were: 1) in awig-awig the caste system was regarded as colour system, because color system was more humane in the social life; 2) in awig-awig there was a tendency of neutralize the gender bias that usually stuck in a patriarchy society such as the Balinese society; 3) in awig-awig, the marriage discourse was comprehended as the meeting of men (purusa) and women (predana), that was based on love, physic, and emotion. It can be concluded that the dominant discourse of caste system, gender, and marriage in awig-awig was seen as an effort to seek a more humane order for the Balinese society.

Key words: *awig-awig text, dominant discourse, existence, meaning*

Teks *awig-awig* merupakan suatu tatanan sosial masyarakat Bali. Sikap, tindakan, dan perilaku sosial masyarakat Bali tidak terlepas dengan tatanan sosial *awig-awig*. Tatanan sosial ini merupakan struktur dan kultur yang menaungi kehidupan masyarakat Bali. Dalam realitas empirik di Bali, teks *awig-awig* dimiliki oleh setiap Banjar adat, yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pembuatan teks *awig-awig*, ada varian antarbanjar adat. *Desa-kala-patra* (tempat, waktu, dan keadaan) menjadi penentu seperti apa *awig-awig* harus disepakati dan digunakan oleh masyarakatnya.

Apabila dipahami dari pemikiran Berger (1990: 73–76), *awig-awig* sebagai tatanan sosial adalah lembaga sosial sebagai hasil objektivasi yang telah terlegitimasi, yang sangat menentukan sikap dan tindakan sosial orang Bali. Suatu kenyataan empiris bahwa konvensi dan konstruksi yang dibangun menimbulkan problem sosial tatkala diimplementasikan tidak secara dinamis dalam masyarakat; misalnya, acap kali dapat membelenggu kemanusiaan masyarakat.

Berbagai problem sosial yang mengemuka dalam masyarakat Bali masa tahun 2000-an, diasumsikan berkaitan dengan tatanan sosial sebagaimana yang ada dalam *awig-awig*. Berbagai problem yang muncul, dalam bentuk *actual reality*, misalnya masih banyaknya timbul soal ketidaksederajatan manusia (Bali Post 2004), konflik penyebutan kebangsawanan

(Bali Post 2004), serta *awig-awig* yang melanggar hak asasi manusia (HAM) (Bali Post 2005).

Sehubungan dengan hal itu, menarik untuk meneliti hubungan antara fenomena yang dihadapi masyarakat Bali dengan teks *awig-awig* yang mengatur kehidupan sosialnya. Teks *awig-awig* yang berfungsi sebagai salah satu institusi sosial dalam masyarakat Bali, memang tampak terlampaui disakralkan, sehingga kerap kali dianggap sebagai aturan yang sudah tidak dapat disempurnakan. Akibatnya, terjadi proses hegemoni oleh institusi sosial itu, dan cenderung menutup peluang kebebasan individu dalam masyarakat. Kondisi seperti itu menjadi kendala utama bagi individu manusia Bali dalam melakukan aktualisasi diri.

Dalam kondisi seperti itu, ada semacam ketakutan yang dialami masyarakat Bali. Struktur dan kultur yang dibangun untuk manusia, justru mengungkung dirinya. *Awig-awig* seakan-akan hadir sebagai sesuatu yang *given* dan tidak dapat diubah lagi, kendatipun zaman terus berubah secara dinamis. Kondisi semacam ini cukup problematik, karena terjadi benturan antara keinginan melanggengkan tatanan sosial dengan tuntutan perubahan zaman. Akibatnya, ruang ekspresi kesadaran dan interpretasi mengalami stagnasi.

Dalam penelitian ini, dilihat seberapa jauh *awig-awig* berperan mengatur dan menjadi tatanan sosial masyarakatnya. Kemudian, secara lebih jauh,

¹ Artikel ditulis dari hasil penelitian yang didanai Ristek-LIPI, Jakarta.

² Korespondensi: I.B. Putera Manuaba, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Jalan Airlangga 4–6 Surabaya 60286, telepon 08155091319, e-mail: ibteram@yahoo.com

kajian ini menyoroti muatan dan wacana tekstual dalam *awig-awig*. Melalui kajian tekstual atas *awig-awig*, bagaimanakah teks ini mengungkap wacana dominan dalam teks *awig-awig* sebagai tatanan sosial masyarakat Bali serta makna apa yang dapat diberikan. Adapun wacana dominan yang dimaksud adalah kasta, gender, dan perkawinan. Untuk itu, ruang lingkup penelitian ini adalah teks *awig-awig* yang pernah diterbitkan di Bali. Kajian yang menggunakan perspektif wacana ini meneliti seberapa jauh teks *awig-awig* mewacanakan wacana dominan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perihal pewacanan teks *awig-awig* atas wacana dominan yang menyangkut kasta, gender, dan perkawinan. Penelitian ini juga bertujuan memaknakan wacana dominan dalam teks *awig-awig*. Makna yang dimaksud adalah bukan yang hanya berkait dengan peningkatan kemanusiaan dan kemasyarakatan lokalitas orang Bali, tetapi secara lebih luas untuk umat manusia.

Penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori wacana, namun juga sebagai tawaran pola peningkatan derajat kemanusiaan. Dengan memaknakan teks *awig-awig*, diupayakan dapat tersusun model tatanan sosial yang lebih kondusif dan memanusia. Maknanya juga diharapkan dapat menyegarkan hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan dengan dinamis.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dimanfaatkan pendekatan kualitatif-tekstual, karena penelitian ini mengkaji wacana dan memaknakan teks *awig-awig* yang ada dalam masyarakat Bali. Dengan pendekatan ini, penelitian akan lebih menekankan pada ke dalam kajian atas wacana dan dominan dan pemaknaannya.

Data penelitian ini adalah teks *awig-awig*. Ada enam teks *awig-awig* yang dianalisis, *awig-awig* yang disahkan tahun 1980-an dan 1990-an, yakni: (1) *awig-awig* Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung (1989) (disingkat AW-A); (2) *awig-awig* Desa Adat Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana (1989) (disingkat AW-B); (3) *awig-awig* Desa Adat Batudingdong, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng (1992) (disingkat AW-C); (4) *awig-awig* Desa Adat Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (1980) (AW-D); (5) *awig-awig* Desa Adat Tohpati, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem (1992) (AW-E);

dan (6) *awig-awig* Desa Adat Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung (1997) (AW-F). Enam *awig-awig* tersebut sudah dipandang cukup mewakili data penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan dengan strategi pendokumentasian dan penyimakan atas teks *awig-awig* yang ada masyarakat Bali, baik yang tercetak maupun yang stensilan. Pendokumenan dilakukan melalui sumber penyimpan teks *awig-awig* seperti perpustakaan dinas kebudayaan Bali dan dari personal-personal Kelihan Adat di Bali. Teks *awig-awig* yang telah terdokumentasi kemudian disimak dan dimaknakan.

Pengabsahan keseluruhan data yang diperoleh, dilakukan dengan cara pencarian data yang representatif, pemeriksaan dengan melibatkan teman sejawat, diskusi dan konsultasi (formal ataupun informal) dengan para pakar budaya. Data dinilai telah representatif manakala dalam proses pengumpulan data sudah dirasa jenuh; artinya, selalu mendapatkan data yang berulang dan sama.

Dalam analisis penelitian ini, dilakukan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi wacana dominan dalam teks *awig-awig*; dan (2) memaknakan wacana dominan yang telah teridentifikasi dalam teks *awig-awig*. Analisis yang mengidentifikasi dan memaknakan wacana dominan dalam *awig-awig* dikaji dari perspektif wacana Foucault.

Hasil dan Pembahasan

Istilah wacana yang digunakan para linguist di Indonesia dan juga negeri berbahasa Melayu lainnya, merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris *discourse*. Dengan demikian, *discourse analysis* pun kemudian diterjemahkan menjadi “analisis wacana” (Oetomo 1993:4). Dalam perkembangannya, istilah wacana dipakai juga oleh berbagai disiplin ilmu, seperti: politik, sosiologi, linguistik, sastra, psikologi, dan komunikasi. Dalam penerapan pada masing-masing disiplin ilmu, terkadang terjadi perbedaan konsep dan pendekatan. Dalam sosiologi misalnya, wacana merujuk terutama pada hubungan antara konteks sosial dan pemakaian bahasa. Namun, umumnya, sosiolog lebih banyak menggunakan diskursus beserta ajektivanya yakni diskursif. Dalam analisis sastra, dan juga analisis teks-teks lain, wacana dipahami sebagai perbincangan realitas sosial yang terkonstruksi dalam teks.

Dari perspektif kajian linguistik, wacana dipahami sebagai suatu rangkaian sinambung bahasa yang lebih besar daripada kalimat; sehingga unit wacana dapat berupa paragraf, percakapan, cerita pendek,

dan seterusnya. Dalam psikologi, wacana diartikan sebagai pembicaraan; dan wacana di sini agak mirip dengan struktur dan bentuk wawancara dan praktik pemakainya (Oetomo 1993: 4; Kartomihardjo 1993: 23).

Studi wacana memusatkan pada penggunaan bahasa; bahasa merupakan aspek sentral dari penggambaran subjek, dan lewat bahasa ideologi terserap di dalamnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Rakhmat (1996: 50) menyatakan ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa. Selain bahasa, ideologi juga merupakan konsep sentral dalam analisis wacana, sebab teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk praktik ideologi atau pencerminan ideologi tertentu (Eriyanto 2001: 13).

Dalam aplikasinya, wacana acap kali dipertukarkan dengan istilah teks. Dalam tradisi komunikasi berbahasa Inggris, teks lebih mengacu pada bahasa tulis, sedangkan wacana pada bahasa lisan. Dari sudut lain, wacana kerap kali menyiratkan sebagai wacana interaktif, sedangkan teks menyiratkan monolog non-interaktif. Dari pemahaman ini dapat dimengerti bahwa wacana bukan hanya berupa yang tertulis tetapi juga yang lisan.

Foucault, seorang post-modernis, memandang wacana berpangkal pada kesatuan-kesatuan yang ada, dan sebagai cara membicarakan kenyataan (Arkoun 1994: 2). Foucault mengistilahkannya sebagai cara manusia menangkap (memandang dan memahami) kenyataan dengan *episteme*. Baginya, *episteme* dan wacana juga tunduk pada berbagai aturan, yang menentukan apa yang dipandang dan dibicarakan dari kenyataan, apa yang dianggap penting dan tidak penting, serta hubungan apa yang ada antar berbagai unsur kenyataan dalam penggolongan dan analisis tersebut. Setiap zaman memandang, memahami, dan membicarakan kenyataan dengan cara yang lain (Arkoun 1994: 2), kendati kenyataannya sebuah wacana akan menentukan objeknya sendiri. Hal ini karena wacana tidak hanya berkisar pada teks saja, tetapi pada praktik-praktik dan konteks di belakangnya. Jadi, jelaslah bahwa wacana merupakan cara manusia (dalam periode, golongan sosial, atau bidang keahlian tertentu) membicarakan kenyataan (realitas ataupun teks).

Mills (1994) dengan merujuk pada pandangan Foucault, membedakan pengertian wacana menjadi tiga macam: (1) wacana dilihat dari level konseptual teoretis; (2) konteks penggunaan; dan (3) metode penjelasan. Berdasarkan level konseptual-teoretis, wacana diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan yaitu semua ujaran (teks) yang mempunyai makna dan efek dalam dunia nyata. Dalam konteks

penggunaannya, wacana berarti sekumpulan pernyataan yang dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu. Pengertian ini menekankan pada upaya untuk mengidentifikasi struktur tertentu dalam wacana yaitu kelompok ujaran yang diatur dengan suatu cara tertentu, misalnya wacana imperialisme dan feminisme. Dilihat dari metode penjelasannya, wacana merupakan suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.

Dalam perkembangannya, wacana (*discourse*, diskursus) ternyata melampaui apa yang digariskan para ahli bahasa-filosofis, terutama dengan sentuhan pemikir post-strukturalis seperti Foucault. Sebagai sebuah praktik, wacana berkaitan dengan sejarah dan waktu. Wacana berkaitan dengan penggunaan bahasa di dalam zaman, waktu, dan tempat tertentu (Piliang 1999: 55–56). Dalam wilayah bahasa, wacana dipandang sebagai cara tertentu dalam berbicara, menulis, dan berpikir. Akan tetapi, Piliang (1999: 42) menyatakan bahwa wacana tidak hanya cara berbahasa, tetapi berkaitan langsung dengan praktik berbahasa tersebut dan relasi sosial di belakangnya. Dengan demikian, wacana bukanlah semata-mata penerapan sistem tanda untuk merepresentasikan sesuatu. Meski wacana melingkupi tanda-tanda dan semiotika, tetapi ia lebih dari sekadar sistem penandaan dan semiotika, karena ada korelasi lain yang melekat pada wacana di luar sistem penandaan. Bagi Foucault, relasi yang paling penting adalah relasi kekuasaan (Piliang 1999: 43).

Sebuah wacana dari sebuah realitas atau teks, mempunyai keterkaitan dengan relasi teks di luar wacana tersebut, yang meliputi realitas lain. Dalam wacana sastra misalnya, mempunyai makna yang berhubungan dengan wacana di luarnya yakni konteksnya. Itulah sebabnya sebuah wacana sastra akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan wacana lainnya, karena akan terdapat kemungkinan dialektika atau memberikan berbagai tawaran pemikiran terhadap wacana yang saling berhubungan itu, meski nantinya memunculkan adanya kontradiksi dan pembalikan nilai-nilai yang ada, tetapi akan muncul sintesis yang lebih dapat diterima sebagai nilai-nilai universal.

Konsep wacana, dalam pemahaman yang post-modernis, memang tidak dapat dilepaskan dari pemikiran sentral Foucault yang melihat realitas sosial sebagai arena diskursif (*discursive field*) yang merupakan kompetisi tentang bagaimana makna dan pengorganisasian institusi serta proses-proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara yang khas. Weedon (1987: 108) mengatakan, wacana merujuk pada berbagai cara yang tersedia untuk berbicara

dan menulis untuk menghasilkan makna yang di dalamnya melibatkan beroperasinya kekuasaan untuk menghasilkan objek dan efek tertentu. Dalam hal ini, wacana melekatkan apa yang didefinisikan sebagai pengetahuan (*knowledge*) dan juga kekuasaan (*power*). Bagi Foucault (1979: 27), kekuasaan (*power*) selalu berimplikasi pada pengetahuan (*knowledge*), sebaliknya tidak ada pengetahuan yang tidak berkorelasi dengan kekuasaan. Dalam ekspresi yang berbeda, Foucault menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan menciptakan objek-objek baru pengetahuan dan sistem informasi, dan pengetahuan secara konstan memproduksi efek-efek kekuasaan. Dengan demikian, bagi Foucault (1980: 131), tidak ada pengetahuan yang dapat dibentuk tanpa sistem komunikasi, akumulasi, dan pengorganisasian yang tidak lain adalah bentuk kekuasaan yang berhubungan dalam keberadaan dan fungsinya dengan bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Sebaliknya, tidak ada kekuasaan dapat diwujudkan ekstasi, penambahan, distribusi, dan penyimpangan pengetahuan.

Wacana sangat berkorelasi dengan pertanyaan elementer: Bagaimanakah sebuah pernyataan lebih mengemuka ketimbang yang lain? (Foucault 1972: 27). Maka itu, setiap wacana harus dilihat dalam konteks yang di dalamnya sedang mengoperasionalkan prosedur dan peraturan yang khas. Wacana selalu menawarkan sebuah paket tentang kondisi-kondisi yang membuat sesuatu menjadi mungkin dan kendala-kendala institusional serta aturan-aturan internal tentang apa yang dapat dan tidak dapat dikemukakan. Pemahaman ini penting untuk mengerti bagaimana dan apa yang dikemukakan dalam sebuah pernyataan atau teks itu sesuai dengan seluruh jaringan yang di dalamnya memiliki sejarah dan kondisinya sendiri tentang keberadaannya. Hasilnya, setiap wacana selalu memuat sesuatu yang memungkinkan (*enabling*) dan membatasi (*limiting*).

Mencermati pemikiran Foucault tersebut, segala aturan dalam wacana memungkinkan orang memproduksi sebuah pernyataan dan menghasilkan klaim kebenaran atasnya. Dalam hal ini, segala aturan pulalah yang mengharuskan orang untuk tetap berada di dalam sistem yang sedang beroperasi dan hanya menghasilkan pernyataan yang sesuai dengan aturan-aturan itu. Bagi Flax (1992: 452), sebagai sebuah kesatuan, wacana tidak pernah salah atau benar, karena kebenaran yang diproduksi selalu kontekstual dan bergantung pada aturan-aturan yang berlaku.

Dalam penelitian atas *awig-awig* ini, kajian wacana yang digunakan lebih banyak menggunakan

pemikiran Foucault untuk mengungkapkan kaitannya dengan wacana dominan. Kendatipun berpijak pada teks *awig-awig*, namun keterkaitannya dengan konteks menjadi sangat penting. Wacana dan makna wacana dikaji dalam korelasinya dengan konteksnya yakni masyarakat Bali.

Keberadaan Teks Awig-awig dalam Masyarakat Bali

Sebagaimana dikemukakan, teks *awig-awig* dalam masyarakat Bali adalah tata sosial kehidupan masyarakat Bali. *Awig-awig* merupakan salah satu istilah yang khas Bali, untuk menyebut norma yang mengatur kehidupan masyarakat, khususnya di desa adat. *Awig-awig* pada setiap desa adat di Bali, sudah ada sejak sebuah desa adat itu ada. Semua *awig-awig* yang ada pada setiap desa adat di Bali, dibuat dalam bentuk tertulis, berupa teks. Namun, *awig-awig* sebagai norma pada setiap desa adat di Bali, memang menjadi tata sosial yang sangat dipatuhi sejak masyarakat dibentuk. Jadi, *awig-awig* menjadi pengikat setiap warga desa dalam satu kesatuan desa adat.

Soeripto (1979: 178) memandang bahwa stabilitas desa sebagian besar ditentukan oleh *awig-awig* yang telah hidup dan berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat desa setempat. Sebagaimana halnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya, *awig-awig* dibuat oleh, untuk, dan dari krama desa serta dipelihara dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran karena hal-hal yang diatur dalam *awig-awig* itu sebagai hal yang memang patut demikian. Hal yang dikatakan Soeripto itu memang ideal, namun dalam realitasnya acap kali kurang sejalan dengan yang ideal itu.

Seiring dengan perkembangan tingkat pendidikan di Bali, terjadilah usaha penulisan *awig-awig* yang dilakukan secara relatif gencar, baik yang dibina oleh tim penelitian dan penulisan *awig-awig* yang ada di setiap kabupaten maupun tanpa pembinaan oleh tim (Windia 1997). Lebih lanjut, Windia menyatakan bahwa kalau penulisan *awig-awig* dengan pembinaan oleh tim pembinaan dari kabupaten, tidak mengalami kesulitan terutama dalam menuangkan konsep aturan yang semula belum ada atau mengubah ketentuan *awig-awig* yang telah mendarah-daging, namun tidak demikian halnya dengan penulisan ketentuan serupa, bila dilakukan tanpa pendamping oleh tim pembina, terjadi banyak kesulitan. Soeripto (1979: 179) juga melihat bahwa perkembangan bentuk dan sistematik *awig-awig* memang sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat. Maka itu, dapat dilihat adanya *awig-awig* yang belum dan telah dituliskan, ada yang ditulis dengan sistematik yang baik dan tanpa sistematik.

Awig-awig sebagai norma dan tertib sosial, dapat dikatakan sudah ada bertahun-tahun. Namun, dalam karakteristiknya sebagai teks tertulis, *awig-awig* baru ada secara tertulis seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan di Bali sekitar tahun 1920-an atau 1930-an. Tradisi penulisan *awig-awig* juga terus mengalami penyempurnaan hingga tahun 1990-an. Sebagai sebuah norma yang disepakati warga desa, *awig-awig* wajib ditaati oleh masyarakatnya. *Awig-awig* itulah yang mengatur seperti apa suatu masyarakat harus dijalankan, bagaimana individu-individu warga desa harus berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Jadi, *awig-awig* yang berhasil diperoleh, kebanyakan mencantumkan tahun pembuatan (penyempurnaan) di sekitar tahun 1990-an.

Semua banjar adat di Bali memiliki *awig-awig*, sebagai norma sosial yang disepakati masyarakatnya. Oleh karena *awig-awig* ini didasarkan pada kesepakatan masyarakat setempatnya, acap kali antara *awig-awig* yang satu dengan yang lainnya memiliki varian. Oleh karena itu, *awig-awig* pada setiap desa menunjukkan adanya perbedaan juga. Misalnya, *awig-awig* desa A berbeda dengan desa B serta berbeda lagi dengan desa C, dan seterusnya. Kendati demikian adanya, dari segi tujuan dan konseptualnya, *awig-awig* antara desa yang satu dengan yang lainnya memang sama, namun dalam muatan isinya berbeda. Oleh karena itu, *awig-awig* desa tertentu hanya dapat berlaku untuk desa tertentu itu saja. Kondisi desa masing-masing sangat menentukan isi *awig-awig*.

Bahasa yang digunakan dalam *awig-awig* adalah bahasa Bali alus singgih dengan huruf latin, namun ada juga *awig-awig* yang ditulis dalam aksara Bali dengan tetap disertai translitasinya dalam huruf latin. Sebagai sebuah teks, *awig-awig* ini disajikan dalam *sarga-sarga*, *palet-palet*, dan *pawos-pawos* (bab--bab, sub-bab—sub-bab, dan sub-sub-bab—sub-sub-bab).

Awig-awig sebagai tata sosial masyarakat adat Bali, mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan adat kemasyarakatan, yang hanya diberlakukan khusus untuk umat Hindu. Umat Islam, Kristen-Protestan, Katolik, Budha, dan lainnya yang ada di Bali, tidak termasuk warga yang diwajibkan menjalankan *awig-awig*; namun beberapa umat beragama ini mengikuti aturan desa dinas/kelurahan/pemerintahan desa. *Awig-awig*, meski secara fisik berupa tatanan sosial masyarakat desa, namun acap kali disebut juga sebagai salah satu hukum adat.

Isi *awig-awig*, umumnya, mengatur pemeliharaan hubungan yang harmonis, baik antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan lingkungan

masyarakatnya (*palemahan*), dan manusia dengan manusia lainnya di dalam hubungan kemasyarakatan (*pawongan*). Hubungan-hubungan tersebut dipelihara dengan kesadaran pada pentingnya tertib sosial yang harus diwujudkan di dalam kehidupan yang dijiwai kekeluargaan, persatuan, dan perasaan suka-duka yang dalam. Hubungan-hubungan itulah yang diidealkan dalam *awig-awig*. Teks *awig-awig* yang dikaji di dalam penelitian ini diupayakan mewakili seluruh kabupaten.

Wacana Dominan dalam Teks Awig-awig

Dalam penelitian ini, wacana dominan yang dimaksudkan di sini adalah wacana-wacana besar yang ada dalam masyarakat Bali. Wacana-wacana itu adalah tentang sistem kasta, gender, dan perkawinan. Wacana-wacana itu sering menjadi problem dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem Kasta dalam Awig-awig

Dalam *awig-awig*, sistem kasta diwacanakan secara eksplisit dan implisit. Dari kajian yang dilakukan atas teks tersebut, sebagian besar tampak tidak ada pengakuan atas keberadaan sistem kasta. Namun demikian, ada juga yang mengakui keberadaannya, sehingga pandangan dan pemosisian atas sistem kasta menjadi berbeda.

Teks *awig-awig* (AW-A Badung 1989), menyebut kata-kata atau kelompok kata *krama banjar* para anggota komunitas, *pengayah* ‘pelayan’, *jadma* ‘orang’, *pamangku* ‘orang suji yang diekajati’, *krama desa* ‘para anggota masyarakat desa’, *bendesa* ‘kepala desa’, *pisaga* ‘tetangga’, *sang sulinggih* ‘pendeta’, dan *penglisir* ‘tetua’. Di dalam kata-kata itu tidak dikenalnya sistem kasta; yang juga tercermin dalam kalimat berikut: “*sang sulinggih utawi panglisir desa adat wenang ngicenin tetimbangan ring sajeroning I bendesa ngajegang daging awig-awig puniki* ‘pendeta atau tetua desa adat berhak memberi pertimbangan Kepala Desa Adat mengenai isi *awig-awig* ini’ (halaman 35). Jadi, di dalam *awig-awig* ini tidak ditemui penyebutan yang menunjukkan adanya pembedaan kasta. Semua orang disebut dengan kata-kata atau kelompok kata yang dapat diperuntukkan warga desa.

Teks *awig-awig* (AW-B Jembrana 1989), juga mewacanakan kata-kata yang netral, yang tidak menunjukkan adanya sistem kasta. Di dalam teks ini disebut: *sahanan warga desa* ‘sekalian warga desa’, *satunggil krama* ‘salah seorang warga’, *teruna-teruni* ‘muda-mudi’, dan *sajeroning* ‘setiap’. Kenetralan

penyebutan itu dapat juga disimak dalam kalimat: ... *sane keicen pamuput olih pandita utawi pinandita* ‘... yang dilimpahkan kewenangan menangani upacara oleh pendeta’ (halaman 25). Teks *awig-awig* (AW-C Buleleng 1992), (AW-D Tabanan 1980), (AW-E Karangasem 1992), dan *awig-awig* (AW-F Klungkung), juga menyebutkan kata-kata yang serupa dengan *awig-awig* sebelumnya, yang mencerminkan tidak dikenalnya sistem kasta.

Dari teks *awig-awig* tersebut diketahui sistem kasta dinetralisasi, sehingga perbedaan kasta tidak nampak dalam *awig-awig* karena yang dike depankan dalam *awig-awig* adalah sistem pengaturan tata sosial yang berlaku untuk semua orang tanpa membedakan kastanya. Oleh karena itu, *awig-awig* dapat dipahami sebagai teks tradisi yang diwarnai semangat modern, yang tidak bias kasta.

Gender dalam Awig-awig

Dalam wacana keseharian dalam masyarakat Bali, gender menjadi persoalan yang cukup banyak disoroti, karena kekerabatan yang dianut adalah patrilineal. Akibatnya, budaya yang menaungi juga adalah budaya patriarkal. Laki-laki menduduki tempat sebagai “manusia kelas satu”, sedangkan perempuan sebagai “manusia kelas dua”. Ada bias gender yang sangat problematik yang dialami oleh manusia Bali.

Namun, mencermati wacana dalam teks *awig-awig*, nampaknya juga terjadi penetralisiran atas bias gender tersebut, kendatipun masih cukup terasa adanya bias gender. Dalam teks *awig-awig* (AW-A Bandung 1989), nampak memang tidak nampak adanya bias gender, yang tercermin dari penggunaan kata-kata yang netral, yang tidak mencerminkan adanya perbedaan laki-perempuan. Dari identifikasi yang dilakukan, kata-kata: *banjar* ‘komunitas warga’, *krama banjar* ‘anggota banjar’, *pamangku* ‘orang yang telah ekajati’, *bendesa* ‘kepala desa’, dan *pisaga* ‘tetangga’, merupakan kata-kata yang tidak berjenis kelamin. Dalam contoh kalimat berikut juga dijumpai adanya penetralisiran: *sajeroning Pamangku, sang pacing modeg pandita utawi pinandita*... “Setiap pamangku, pengganti pandita atau pinandita ... (halaman 19). Dari kalimat itu dapat disimak bahwa “pamangku” atau “pinandita”, dapat saja berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Teks *awig-awig* (AW-B Jembrana 1989), tampak agak dominan memandang laki-laki lebih utama daripada perempuan, yang ditunjukkan misalnya dalam bagian teks berikut: *sane sinanggeh ahli waris luwire... preti sentana purusa antul yayahrena,*

melarapan antuk pawiwaha agama sane sah manut agama... ‘orang yang berhak menjadi ahli waris... pihak laki-laki, berdasarkan perkawinan yang sah menurut agama (halaman 39). Apabila tidak ada laki-laki yang berhak sebagai ahli waris, maka dapat diwariskan pada keturunan laki-laki atau keponakan laki-laki: *prade tan wenten sekadi ring ajeng kapatutang dados preti sentana luwire: turunan kulawarga purusa kapernah...*, *turunan kapernah, kesamping, keponakan...*, Kemudian, jika juga tidak ada keluarga maka diserahkan kepada Desa: *yening putung (ceput) tan madruwe papernahan waris, warisan kawenangan antuk Desa* (halaman 40).

Teks *awig-awig* (AW-C Buleleng 1992), (AW-D Tabanan 1980), (AW-E Karangasem 1992), dan (AW-F Klungkung 1997), juga menunjukkan adanya pandangan bias gender. Namun, banyak juga menunjukkan adanya tidak bias gender, misalnya ketika menyebutkan seseorang atau sekelompok orang, dengan penggunaan kata-kata: *krama* ‘warga’, *prajuru* ‘pengurus’, *sang sulinggih* ‘sang pendeta’.

Mencermati beberapa teks *awig-awig*, kendati pun mulai ada kesadaran kesetaraan gender, namun budaya patriarkal yang menaungi masyarakat Bali memang masih cukup kuat. *Awig-awig* yang ditulis sebagai aturan tata sosial adat Bali, memang sudah mulai terbuka untuk mendudukkan perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan laki-laki.

Perkawinan dalam Awig-awig

Perkawinan merupakan satu hal lainnya yang menarik diungkap dalam teks *awig-awig*. Dalam teks *awig-awig* (AW-A Bandung 1987), disebutkan bahwa perkawinan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang berdasarkan cinta, baik lahiriah maupun batiniah. Dalam teks disebutkan: *pawiwahan inggih punika patemoning purusa predana, malaparan panunggalan suka cita kadulurin upasakti skala niskala*, ‘pernikahan adalah bertemunya laki-laki dan perempuan menjadi satu atas dasar cinta, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan (halaman 27). Dalam teks itu dikatakan bahwa perkawinan di antaranya dapat dilakukan dengan: *pepadikan/ngidih* ‘meminta’, *ngerorod/ngalayat* ‘lari’, dan *nyeburin/sentana* ‘perkawinan laki-laki ke pihak perempuan’ (halaman 27).

Dalam teks *awig-awig* (AW-B Jembrana 1989), tentang perkawinan ada bagian yang ditekankan, yakni menyangkut perkawinan yang patut dihindari: (a) *ngrerangkatan tumin dinyama* ‘mengambil sepupu’; (b) *pianak temen* ‘anak teman’ c) *semeton sios biyang/ibu* ‘saudara yang beda ibu’, dan

(d) *malagandang* ‘kawin paksa’ (halaman 34). Perkawinan itu dianggap terlarang, karena dikaitkan dengan akan tidak baiknya keturunan jika perkawinan itu dilakukan.

Di samping itu, diatur juga dalam *awig-awig* bahwa perkawinan hanya dibolehkan menikahi satu orang saja, dan tidak diperbolehkan kawin dengan lebih dari satu orang, kecuali ada persetujuan istri. Dalam teks *awig-awig* disebutkan: *kapatutang sang lanang marabi adiri, sejawaning wenten panubaya saking rabine...* ‘dibolehkan laki-laki kawin dengan satu orang, kecuali ada persetujuan dari istrinya (halaman 35).

Dalam teks *awig-awig* (AW-C Buleleng 1992), menekankan bahwa yang boleh kawin jika memang sudah dianggap dewasa sesuai dengan undang-undang dan didasarkan pada cinta dan bukan dipaksa. Dalam teks dikatakan: *pidabdab sang pacang pawiwahan patut: (a) sampun manggeh deha-teruna nganutin undang-undang lan; dan (b) sangkaning pada rena*. Apabila memenuhi syarat itu, seseorang diperbolehkan menikah. Teks *awig-awig* (AW-D Tabanan 1980), (AW-F Karangasem 1997), dan (AW-G Klungkung 1997) juga mengungkapkan arahan yang sama tentang perkawinan.

Makna Wacana Dominan dalam Teks Awig-awig

Berdasarkan kajian tentang keberadaan wacana dominan sistem kasta, gender, dan perkawinan dalam teks *awig-awig*, dapat dimaknakan seperti berikut.

Dalam memandang sistem kasta, teks *awig-awig* Bali memiliki pandangan yang sama, yakni tidak begitu kentalnya lagi diungkap sistem kasta, karena di dalamnya lebih banyak menggunakan *sistem warna*, sistem berdasarkan guna dan karma (pembagian tugas dan kewenangan). Oleh karena itu, di dalam teks tidak dibedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kata-kata, kelompok kata, dan kalimat yang netral digunakan sebagai wahana penyampaian pandangan itu.

Dalam memahami gender, teks *awig-awig* memahami wacana itu pada dua kecenderungan yakni ada yang mengarah pada yang tidak bias gender dan sekaligus bias gender. Kendatipun pandangan tidak bias gender tampak lebih menonjol dalam teks *awig-awig*, tetapi adanya yang bias gender masih menjadi persoalan yang prinsip. Bias gender, yang mendiskriminasi perempuan, berimplikasi pada pemosisian perempuan pada manusia yang tidak sederajat dengan laki-laki. Namun, bias gender ini sudah tidak tampak menonjol dalam teks *awig-awig*, karena sudah mulai ada penetralisan.

Dalam pandangan tentang perkawinan, teks *awig-awig* memang memiliki pandangan yang serupa antarsatu teks dengan teks lainnya. Hanya saja masing-masing punya penekanan pada yang berlaku pada situasi dan kondisi daerah di mana teks *awig-awig* itu diciptakan dan diberlakukan. Dari keseluruhan *awig-awig* yang dikaji, teks tersebut memandang bahwa perkawinan sebagai pertemuan laki-laki (*purusa*) dan perempuan (*predana*) yang harus dilandasi atas cinta kasih. Dalam perkawinan itu, dapat menempuh banyak jalan: *mepadik, kawin lari*, dan seterusnya. Di samping itu, dalam perkawinan juga tidak diperbolehkan kawin dengan yang harus dihindari, agar keturunannya menjadi baik.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa teks *awig-awig* mencoba memahami sistem kasta sebagai sistem warna, karena sistem warna lebih memanusiakan dalam konteks kehidupan masyarakat. Dalam teks *awig-awig* ada kecenderungan menetralkan dan mengurai soal bias gender yang melekat pada budaya patriarkal. Wacana perkawinan dipahami sebagai prinsip pertemuan antara laki-laki (*purusa*) dan perempuan (*predana*), yang didasarkan pada cinta, lahir dan batin. Wacana dominan sistem kasta, gender, dan perkawinan dalam teks *awig-awig* bermakna sebagai wacana yang mendiskusikan kembali kemungkinan aturan agar lebih memanusiakan.

Daftar Pustaka

- Arkoun, M (1994) *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan di Jalan Baru*. Jakarta: LKiS.
- Anonim (1987) AW-A Badung/*Awig-awig* Desa Adat Panjer Kabupaten Badung Denpasar Selatan Kota Madia Denpasar Bali.
- Anonim (1989) AW-B Jembrana/*Awig-awig* Desa Adat Perancak Negara Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, Bali.
- Anonim (1980) AW-C Buleleng/*Awig-awig* Desa Adat Batudingdong, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Anonim (1980) AW-D Tabanan/*Awig-awig* Desa Adat Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali.
- Anonim (1992) AW-E Karangasem/*Awig-awig* Desa Adat Tohpati, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
- Anonim (1997) AW-F Klungkung/*Awig-awig* Desa Adat Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
- Berger, PL & Luckmann, T (1990) *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan oleh Hasan Basari). Jakarta: LP3S.

- Eriyanto (2001) Analisis Wacana. Yogyakarta: LkiS.
- Kartomihardjo, S (1993) Analisis wacana dan penerapannya. Dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed.). Pertemuan Linguistik. Lembaga Atma Jaya Keenam (PELLBA 6). Yogyakarta: Kanisius.
- Plax, J (1992) The end of innocence. Dalam J. Buler and J. Scott (eds.). *Feminists Theorize the Political*. New York: Routledge.
- Foucault, M (1972) *The Archeology of Knowledge*. London: Routledge.
- Foucault, M (1979) *Displine and Panish*. New York: Random House.
- Foucault, M (1980) *Power Knowledge: Selected Interview and Other Writtings* (edited by Colin Gordon). Brighton: Penguins Books.
- Mills, S (1994) *Discourse*. London: Routledge.
- Oetomo, D (1993) Pelahiran dan perkembangan analisis wacana. Dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed.). *Pelba 6-Analisis Wacana, Pengajaran Bahasa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Piliang, YA (1999) *Hiper-Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta: LkiS.
- Rakhmat, J (1996) Komunikasi dan perubahan politik di Indonesia. Dalam Yudi Latif, dkk. (eds.). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggng Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Soeripto, KRN (1979) *Hukum Adat Waris Bali*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Wartawan Bali Post (2004) Konflik Sebutan Kebangsawanan di Bali. (<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/10/16/S1.htm>). Diakses 1 Mei 2010.
- Wartawan Bali Post (2005) Benahi Awig-awig yang Langggar HAM (<http://www.balipost.co.id/balipostce tak/2005/7/26/02.htm>). Diakses 1 Mei 2010.
- Weedon, C (1987) *Feminist Practice and Poststructuralist Theory*. Oxford: Basil Blackwell.
- Windia, WP (1997) *Penuntun Penyuratan Awig-awig*. Denpasar: Upada Sastra